



## **Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Manekan Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang)**

**Theny I. B. Kurniati Pah<sup>1</sup>, Marthina Raga Lay<sup>2</sup>, Jeni J. Therik<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

<sup>1</sup>kurniatipah@staf.undana.ac.id

<sup>2</sup>tinwini.tw@gmail.com

<sup>3</sup>jenitherik@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini mencoba memetakan permasalahan peran dari BUMDes Manekan yang berlokasi Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Lebih lanjut penelitian ini menyoroti desa sebagai basis yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pemerintahan demi kesejahteraan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran BUMDes Manekan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Peneliti mencoba untuk melihat peran BUMDes Manekan yaitu pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun rencana kerja, menyusun laporan. Peran BUMDes tersebut lebih difokuskan ke peran BUMDes dalam pemberdayaan. Sehingga focus penelitian terdiri dari terpenuhinya kebutuhan dasar, akses terhadap layanan public, mampu untuk berpartisipasi aktif, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungan, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. BUMDes Manekan telah melakukan sebagian besar usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pemberian modal usaha, namun masih terkendala dalam pengembangannya yang macet. Pengelolaan BUMDes tidak mempertimbangkan kesiapan masyarakat. Modal tersedia namun masyarakat tidak mampu karena tidak berdaya.

**Kata Kunci:** BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Peran.

### **Abstract**

*This research tries to map the problem of the role of BUMDes Manekan which is located in Oefeto Village, Amabi Oefeto District, Kupang Regency. This research further highlights villages as a basis that must be considered in government management for welfare. Therefore, this research tries to analyze and describe the role of BUMDes Manekan in community empowerment in Oefeto Village, Amabi Oefeto District, Kupang Regency. The method used in this research is qualitative. Researchers try to look at the role of BUMDes Manekan, namely managing work units, managing resources within the business scope, preparing work plans, compiling reports. The role of BUMDes is more focused on the role of BUMDes in*

*empowerment. So the research focus consists of fulfilling basic needs, access to public services, being able to participate actively, awareness of strengths and weaknesses in oneself and the environment, the ability to control oneself and one's environment. BUMDes Manekan has made most of its efforts to improve the community's economy, such as providing business capital, but is still hampered by stalled development. BUMDes management does not take into account community readiness. Capital is available but people cannot afford it because they are helpless.*

**Keywords:** BUMDes, Community Empowerment, Role.

## 1. Pendahuluan

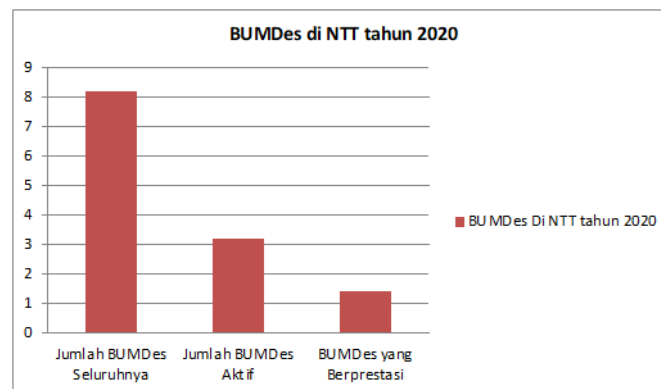
Pengentasan kemiskinan khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah. Mengingat kompleksnya masalah kemiskinan yang ada, sebagai sarana memperoleh informasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap program-program pembangunan, dan sebagai wadah untuk menyalurkan hak-hak demokrasi (Utama & Gunartha, 2020). Pemerintah terus merangkul partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai sarana dasar untuk membangun kapasitas lokal menuju peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, pembangunan dan perubahan di tingkat local (Ahmad & Abu Talib, 2015). Tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi pendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan dipahami dengan cara yang sangat khusus sebagai berbagai tingkat kemitraan antara aktor negara dan warga negara (Dean, 2018; Rojikinnor et al., 2022). Desa menjadi basis yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pemerintahan demi kesejahteraan. Pada perkembangannya pemerintah mengeluarkan aturan mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya demi terciptanya kemandirian desa melalui lembaga usaha yang dibentuk oleh desa (Nursetiawan, 2018). Oleh karena itu pengelolaan desa dinilai mampu menunjang kesejahteraan desa yang didukung oleh kesiapan warga desanya sebagai sumberdaya yang ada pada desa itu sendiri.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan mempunyai modal melalui penyertaan yang berasal dari kekayaan Desa guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk kesejahteraan Masyarakat desa. Adapun peraturan tentang desa memberi harapan bagi warga desa untuk berkembang dan berdaya. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik seperti akuntabel, transparan, partisipatif dan pertumbuhan ekonomi desa. Dengan demikian BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan potensi desa. Tugas BUMDes dalam hal ini melakukan pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun rencana kerja dan menyusun laporan. Dalam peraturan ini juga berarti dikatakan bahwa pengelolaan lembaga usaha desa oleh Pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri menuju desa yang berdaya untuk kemandirian.

Untuk mencapai desa yang berdaya demi kemandirian, Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya BUMdes. Jumlah desa yang berada di NTT khususnya yang memiliki BUMDes sebanyak 3.026 desa, 1.087 diantaranya merupakan BUMDes yang aktif. Dua desa diantaranya masuk menjadi BUMDes terbaik di Indonesia. Dua BUMDes tersebut adalah BUMDes Au Wula di Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende dan BUMDes 7 Maret Desa Hadekewa di kecamatan Lebatukan Kabupaten Lewoleba. Kelebihan dari kedua BUMDes ini yaitu terletak pada pasar kerja yang berbasis digital yang memanfaatkan teknologi serta keberhasilan dalam membangun

kerjasama dengan pengusaha luar daerah sehingga menjadi peluang berkembangnya BUMDes pada kedua desa tersebut. Berbeda dengan keadaan pada salah satu Kabupaten di NTT yaitu Kabupaten Kupang. Memiliki 160 desa namun dari desa-desa tersebut baru 60 desa yang memiliki BUMDes dan sisanya belum memiliki BUMDes.

Pada pengelolaannya ada berbagai variasi usaha yang dilakukan BUMDes, dan yang paling banyak dilakukan antara lain jasa penyewaan kursi, tenda, penyaluran air bersih menggunakan tangki air, penyaluran hasil pertanian serta pengembangan sector pariwisata. Dari beberapa BUMDes yang aktif tersebut, terdapat dua desa yang berhasil melakukan pengelolaan BUMDes untuk pengembangan pariwisata yaitu Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat dengan wisata alam Pantai “Tub Afu” dan Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah dengan potensi wisata pantai Sulamanda (Merdeka.com, 2020).



**Gambar 1. BUMDes di NTT**

*Sumber : data diolah penulis, 2022*

Pengelolaan BUMDes yang terjadi di NTT terdapat perbedaan yang mencolok, misalnya tingkat keberhasilan dari pengelolaan BUMDes. Desa Oefeto menjadi salah satu desa yang memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Manekan. Jenis usaha pada umumnya sama seperti BUMDes yang terdapat di Kabupaten Kupang lainnya. BUMDes tersebut tidak berjalan dengan baik. Kendala yang ditemukan adalah jenis usaha yang hampir sama dengan desa-desa yang lain, sulit untuk memasarkan hasil produksi ketika masa panen tiba. Selain itu ada jenis usaha lain seperti peminjaman modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha tetapi pengembalian yang tidak tepat waktu bahkan tidak bisa dikembalikan karena modal habis bukan untuk kepentingan usaha. Hal lainnya juga masalah insentif yang diberikan kepada pengelola BUMDes yang sangat kecil karena bergantung pada keuntungan dari BUMDes. Pembentukan BUMDes sebagai badan usaha pemerintah mendorong warganya berpartisipasi aktif demi kesejahteraan tetapi hal itu tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan (Fennell, 2019). BUMDes seharusnya dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang berdaya, namun pada kenyataannya masih terkendala dengan sumberdaya manusia yang mengelolanya sehingga tidak menunjukkan progress untuk kesejahteraan demi menjadi desa mandiri (Sari, 2021).

BUMDes sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Peran Bumdes seperti pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun rencana kerja demi menuju Masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya BUMDes tidak serta merta hanya meningkatkan kesejahteraan secara finansial tetapi membentuk masyarakat yang partisipatif dan berdaya pikir yang baik, inovatif,

dan professional. Pemerintah terus merangkul partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai sarana dasar untuk membangun kapasitas local menuju peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan masyarakat sangat terkait dengan rasa kebersamaan dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup (Ahmad & Talib, 2015). Namun, kondisi Masyarakat yang tidak siap untuk kreatif dan inovatif menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan peran dari BUMDes. Perkembangan BUMdes masih belum stabil. Hal ini terlihat dari kurangnya dukungan terhadap potensi ekonomi yang ada di desa, kurangnya partisipasi atau tindak lanjut dari pengelola BUMdes dan juga warga desa. Tingkat kemajuan desa masih rendah dan belum ada peningkatan yang signifikan (Subehi et al., 2020).

## 2. Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian studi kasus pada program BUMDes Manekan di desa Oefeto. Studi ini dipilih agar dapat memberikan keleluasaan pada teknik pengumpulan data dan analisisnya, guna memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap objek yang diteliti khususnya mengenai Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling*, berkaitan dengan kebutuhan informasi yang ingin diperoleh di lapangan, maka informan dalam penelitian ini dipilah kedalam dua kategori yaitu, lembaga dan individu yang terdiri dari Pemerintah Desa, Perangkat BUMDes, Masyarakat desa Oefeto Kabupaten Kupang. Untuk itu tehnik penjangkaran data dari informan seperti Kepala Desa, Ketua dan Perangkat kerja BUMDes, Masyarakat pengguna layanan BUMDes dipergunakan adalah *snowball*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi dan Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pada tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data lalu dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai hasil penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

Masyarakat Oefeto dikenalkan dengan BUMDes pada tahun 2018. Dalam pembentukannya dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat sehingga BUMDes menjadi harapan baru bagi perekonomian desa Oefeto. Pada perekrutan badan pengurus BUMDes juga dilakukan melalui musyawarah menghasilkan pengurus BUMDes yang terdiri dari 5 orang dengan jabatannya masing-masing sebagai ketua sekertaris, bendahara ketua unit barang dan jasa, ketua unit simpan pinjam.

Potensi penghasilan yang ada di desa dikelola BUMDes. Hal ini disebabkan karena ada penyertaan modal dari pemerintah ke BUMDes. Sehingga BUMDes seharusnya menjadi sumber perekonomian untuk masyarakat Oefeto. BUMDes milik bersama, masyarakat yang mengelolanya dan ditujukan untuk masyarakat.

Jenis-jenis usaha dari BUMDes diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan akan kebutuhan di desa. Namun jenis- jenis usaha ini tidak dapat sepenuhnya dijalankan, karena jenis usaha ini hanya musiman ketika dibutuhkan masyarakat. Misalnya Hantracktor dipakai ketika persiapan lahan, demikian juga dengan pompa air dan pemipil jagung. Sewa kursi dan tenda yang

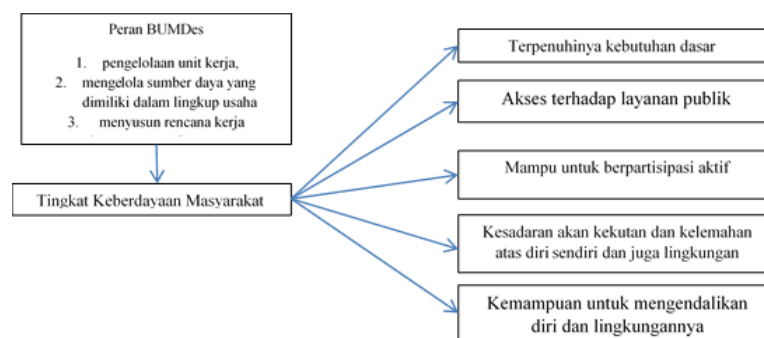
juga bersifat musiman ketika ada acara sukacita atau dukacita di desa. Lalu yang terakhir adalah usaha simpan pinjam yang dipahami sebagai bantuan social bukan sebagai dana rangsangan peningkatan ekonomi masyarakat. Jenis usaha yang dikelola di BUMDes Manekan desa Oefeto tidak ada yang menunjukkan pendapatan pasti yang diterima tetap per bulan atau per hari. Karakteristik jenis ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa, yang harus lebih peka mengetahui mengapa pengurus BUMDes tidak mampu mengelola BUMDes dengan baik. Pendapatan akan minim jika jenis usaha dari BUMDes hanya berkarakteristik musiman atau jika diperlukan saja.

Desa Oefeto sebagai satu-satunya desa yang menerima bantuan mesin pemipil jagung. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah desa agar membantu masyarakat dalam pengelolaan hasil pangan kelak. Harapannya memudahkan masyarakat pada masa panen atau pada masa dimana dibutuhkan mesin pemipil dan BUMDes yang menangani penggunaan mesin pemipil ini.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi BUMDes, seperti pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun rencana kerja, serta menyusun laporan kerja juga dilakukan oleh BUMDes Manekan. Namun, prosesnya mengalami kendala. Kenyataan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang ada di BUMDes Manekan tidak mudah untuk dilakukan. Sumberdaya yang terbatas merupakan keadaan yang dihadapi oleh BUMdes ini. Kendala dalam pengelolaan BUMDes yaitu pengurusnya kurang focus. Tidak siap untuk melaksanakan tugas pengelolaan sumberdaya demi melayani masyarakat. Focus pengurus BUMDes tidak seperti layaknya suatu perusahaan di desa sehingga tidak berjalan dengan baik. BUMDes bukan dijadikan sumber mata pencaharian utama. BUMDes dilaksanakan sebagai sampingan dari pengurus BUMDes tersebut. Berbeda dengan yang diharapkan pemerintah desa, yaitu yang mengelola adalah yang benar-benar menjadikan BUMDes sebagai tugas dan pekerjaan pokoknya. Selain itu insentif 10% dari tiap unit penghasilan juga tidak pasti. Sehingga BUMDes dinilai oleh pengurus sebagai hal yang kurang menjanjikan. Permasalahan mengenai kapasitas dari sumberdaya manusia pengurus BUMDes ketika dilihat dari keadaan di desa Oefeto, mengarah kepada bagaimana kesiapan dari sumberdaya pengurus BUMDes itu sendiri. Pengurus di desa Oefeto beranggapan bahwa BUMDes tidak bisa dijadikan sumber utama pendapatan. Hal ini karena keadaan dari masyarakat sendiri yang memiliki karakteristik yaitu komunal.

### 3.2 Pembahasan

Untuk dapat melihat peranan dari BUMDes dalam pemberdayaan, tim peneliti mencoba membahasnya dengan melihat bagaimana pengurus BUMDes berdaya khususnya dilihat dari tingkat keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat digambarkan melalui matrix di bawah ini (Gambar 2). Oleh karena itu, pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa poin, sebagai berikut.



**Gambar 2. Matrix Peran BUMDes dengan Pemberdayaan**

### **a. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan**

Masyarakat desa Oefeto umumnya bermatapencaharian sebagai petani lahan kering. Jagung sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan pokok. Dari jagung yang dihasilkan digunakan sebagai sumber penghasilan dan pemenuhan asupan panganan dari masyarakat. Selain itu berternak juga merupakan sumber penghasilan masyarakat. Memelihara sapi, babi, kambing untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat desa oefeto juga memilih alternatif pekerjaan lain seperti ojek. Pada selesai masa menanam, maka ojek menjadi pilihan. Ojek dilakukan setelah selesai kegiatan dari kebun. Selain itu, berdagang juga dilakukan oleh masyarakat desa Oefeto untuk menambah penghasilan masyarakat.

BUMDes Manekan ada di desa Oefeto untuk meningkatkan pendapatan desa dan mempermudah masyarakat mendapatkan fasilitas desa untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan usaha masyarakat. Namun, BUMDes dinilai belum sepenuhnya menunjang pekerjaan di desa karena masih terbatasnya jumlah barang yang disewakan. Kendala yang lain, masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa masyarakat rugi dengan menyewa yang ada di desa, hal ini disebabkan karena dapat menambah pengeluaran untuk sewa. Pemenuhan kebutuhan lewat tawaran dari BUMDes melalui usaha simpan pinjam bagi masyarakat juga tidak dapat menunjang pemenuhan kebutuhan karena tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat pelaku usaha. Dengan adanya BUMDes pemenuhan kebutuhan masyarakat belum terlalu signifikan.

### **b. Akses Terhadap Layanan Publik**

Pada dasarnya setiap masyarakat yang mendapat pelayanan public oleh pemerintah. Sebagai jawaban kehadiran pemerintah maka akses terhadap layanan public dilakukan kepada masyarakat termasuk dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pelayanan public juga dirasakan oleh masyarakat di desa Oefeto. Pelayanan urusan administrasi birokratis terhadap masyarakat, dan pelayanan kesehatan contohnya. Untuk program-program desa seperti pemberdayaan, pemberian bantuan langsung dan program-program lain dari pemerintah.

BUMDes merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa Oefeto sudah mengetahui program BUMDes ini walaupun baru berjalan kurang lebih 2 -3 tahun. BUMDes Manekan disosialisasikan ke masyarakat desa salah satunya untuk membantu menyelesaikan masalah public yang ada di Oefeto.

BUMDes Manekan menyediakan fasilitas layanan bagi masyarakat khususnya layanan bagi masyarakat yang membutuhkan mesin pemipil, pompa air, penyewaan kursi serta tenda. Setiap akses layanan ini diberikan bagi masyarakat, sesuai yang tersedia di BUMDes Manekan namun layanan tersebut terkadang tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat karena keterbatasan jumlah. Selain itu mesin pemipil yang ada di BUMDes juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih tingginya adat istiadat yaitu bekerja bersama-sama dalam masa panen atau secara gotong royong. Mesin pemipil juga tidak begitu diperlukan karena hasil dari jagung tidak semuanya harus dipipil.

Peminjaman modal usaha yang dilakukan bagi masyarakat juga terbuka untuk umum tetapi dibatasi berdasarkan RT/RW yang ada di desa. Peminjaman modal ini dilakukan juga berdasarkan

bantuan pendataan dari RT dan RW. Masyarakat yang dinilai memiliki berdasarkan syarat seperti KTP, KK, pemilihan jenis usaha serta besaran modal usaha.

### **c. Mampu Untuk Berpartisipasi**

Sebagian besar masyarakat desa Oefeto mengetahui adanya layanan sewa yang ada di BUMDes namun pemanfaatannya kurang begitu menjadi pilihan. Beberapa yang dapat mengakses layanan BUMDes mengatakan bahwa BUMDes membantu menunjang pekerjaan mereka dalam berkebun. Tetapi sebagian yang tidak menggunakan mengatakan bahwa mereka lebih memilih berkerja secara manual layaknya sebelum ada BUMDes.

Penggunaan sewa alat yang ada di BUMDes Manekan oleh warga belum dilakukan sepenuhnya seperti penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya. Pemikiran akan adanya pengeluaran tambahan, masih menggunakan cara yang tradisioanal atau manual dalam berkebun juga masih sering dilakukan. Namun, ada hal lain yang menjadi pikiran masyarakat adalah pertanggungjawaban dari penggunaan barang-barang BUMDes yang disewakan. Masyarakat enggan menyewa dari BUMDes karena tidak tahu menggunakan alat-alat tersebut. Ketika menggunakan alat-alat tersebut harus meminta bantuan petugas BUMDes. Alternatif dalam penggunaannya alat-alat yang disewakan oleh BUMDes untuk menunjang pekerjaan dilakukan secara berkelompok. Sehingga selain menghemat waktu pengerjaan, membantu juga yang tidak dapat menggunakan alat-alat yang disewakan di BUMDes.

Penggunaan jasa lainnya yaitu BUMDes lainnya juga mengalami kendala. Seperti pemanfaatan pinjaman modal oleh masyarakat. Masyarakat dikenalkan dengan simpan pinjam yang ada di BUMDes namun pelaksanaannya masyarakat tidak dapat mengelola usaha yang telah dibentuk. Modal usaha yang dipinjam tidak mampu dikembalikan karena dipakai untuk membelanjakan kebutuhan pokok. Hal demikian dapat dinilai sebagai gagalnya masyarakat berpartisipasi dalam program-program BUMDes. Keadaan ini membuat BUMDes gagal tumbuh dan tidak dapat membantu mewujudkan kemandirian desa.

### **d. Kesadaran Akan Kekuatan dan Kelemahan Atas Diri Sendiri dan Juga Lingkungan**

Program-program BUMDes yang ada di desa Oefeto menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana masyarakat desa mampu mengenal kekuatan kelemahannya. Dalam merespon cara kerja BUMDes untuk menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan pengembangan desa sebenarnya sudah dilakukan masyarakat. Pemahaman akan adanya BUMDes bagi sebagian masyarakat dinilai membantu. Tetapi ada juga yang masih memikirkan BUMDes sebagai program-program bantuan pemerintah lainnya seperti bantuan social bukan tentang pemberdayaan.

Kehadiran BUMDes Manekan di desa Oefeto sebenarnya karena pemahaman aparat desa yang harus meningkatkan penghasilan masyarakatnya untuk mencapai kemandirian. Dengan usaha dari pemerintah desa yang satu -satunya menerima bantuan desa seperti mesin pemipil jagung untuk menunjang pekerjaan masyarakat desa sebenarnya suatu kemajuan. Tetapi pemahaman tersebut tidak sejalan dengan masyarakat. BUMDes tidak sepenuhnya dapat membantu kemandirian desa karena dinikmati hanya sebagian kalangan saja.

Tingkat pemahaman masyarakat bahwa produk-produk yang ada di BUMDes seharusnya bantuan cuma-cuma bukan yang seharusnya disewakan oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat dapat mengakses bantuan tersebut tanpa mengeluarkan biaya sewa. Masyarakat memahami bahwa

pemerintah desa dan pengurus BUMDes tidak semestinya menarik biaya sewa dari masyarakat desa lagi karena seharusnya itu bersumber dari dana desa. pemahaman seperti ini juga menjadikan BUMDes lemah dimata masyarakat.

Pengguna jasa pinjaman modal ke BUMDes dinilai sebagai yang paling membuat usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik. Pemberian pinjaman modal ini tidak diikuti dengan pengembalian yang baik dan benar serta tepat waktu dari pengguna jasa tersebut. Pengembalian modal usaha selalu tak dapat dilakukan karena modal usaha tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan pemahaman yang timpang dari modal usaha tersebut. Modal usaha dinilai sebagai bantuan desa. Bukan dinilai sebagai dana rangsangan untuk pembangkit usaha yang ada pada masyarakat sehingga pemikiran untuk pengembalian dana juga tidak begitu dipikirkan sebagai hal yang wajib. Hal yang dipikirkan masyarakat adalah BUMDes tidak seperti Bank yang akan memberi sanksi apabila tidak mengembalikan modal usaha.

Keadaan yang ada di masyarakat Oefeto terjadi sebenarnya karena tingkat pemahaman pada masyarakat tersebut. Lingkungan yang masih kental dengan budaya tradisional juga seharusnya diperhitungkan dalam pengelolaan BUMDes. Konsep BUMDes yang ada adalah mengutamakan yang meningkatkan modal. Sedangkan masyarakat masih memahami bahwa sebenarnya segala sesuatu dilakukan karena adanya prinsip social dan tidak dapat tergantikan dengan pengembalian modal. Maka kelemahan terbesar dari BUMDes ini karena pemahaman masyarakat yang pada dasarnya tidak memikirkan bahwa ada pergantian biaya apapun dalam penggunaan alat-alat.

#### **e. Kemampuan Untuk Mengendalikan Diri dan Lingkungannya**

Kekuatan dan kelemahan yang dijelaskan pada bagian di atas sebenarnya dapat menggambarkan kemampuan untuk pengendalian diri dan lingkungan oleh masyarakat desa Oefeto.

Pemerintah desa dengan kemampuannya mengarahkan masyarakat agar desa Oefeto mampu atau berdaya secara mandiri dengan adanya pengelolaan BUMDes yang baik. Program-program yang ada di BUMDes dikerahkan untuk membantu masyarakat. Pengurus BUMDes Manekan dipilih juga secara musyawarah sebenarnya untuk melakukan pengelolaan usaha namun masih berbenturan dengan adanya kepentingan lain di luar BUMDes. Masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari BUMdes Manekan juga sebenarnya masih belum dapat sepenuhnya menggunakan jasa dari BUMDes karena terkendala pemahaman yang masih tradisional.

Produk – produk usaha yang coba dilaksanakan oleh BUMDes memang menyesuaikan dengan kebutuhan desa Oefeto. Namun pada kenyataannya hanya bersifat musiman. Produk usaha juga dipakai secara berkelompok karena terkendala jumlah. BUMDes menjalankan produk usaha yang masih umum. Sehingga Ketika dibutuhkan secara bersamaan belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.

Pemenuhan stimulus modal usaha juga tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pengurus dan masyarakat desa BUMDes. Pengembalian yang tidak tepat waktu juga membuat BUMDes tidak berkembang dan menghambat penggajian pengurus BUMDes Manekan. Oleh karena itu pengembangan BUMDes juga harus ditunjang dari kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Baik pengurus maupun penerima pinjaman dari BUMDes.

BUMDes sebagai program pembangkit kemandirian pada masyarakat desa Oefeto belum sepenuhnya mampu membantu kebutuhan masyarakat. BUMDes dinilai sebagai program-program musiman pemerintah yang ada dan dinikmati tanpa tahu keberlanjutan dan tujuan



utamanya oleh masyarakat. BUMDes belum sepenuhnya secara bersama – sama oleh masyarakat sebagai jawaban dalam kemandirian desa suatu desa.

#### 4. Kesimpulan

Desa Oefeto telah melaksanakan program BUMDesnya sejak tahun 2019. Dengan adanya BUMDes diharapkan desa Oefeto semakin ada perubahan demi kemajuan desa. Namun pada kenyataannya, peran BUMDes di desa Oefeto memberikan tawaran-tawaran jenis usaha yang masih terbilang umum. Jenis-jenis usaha tersebut terlalu umum dan hanya dibutuhkan pada masa-masa tertentu saja. Jenis usaha ini juga umumnya dipandang masyarakat tidak membantu terlalu banyak bahkan ada yang menganggap bahwa jenis usaha tersebut menambah pengeluaran.

Hal lain juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran BUMDes adalah pandangan masyarakat terhadap BUMDes itu sendiri. Usaha yang dijalankan BUMDes seperti simpan pinjam masih dinilai sebagai pemberian bantuan social bukan pemberian dana stimulus untuk memulai usaha kecil di desa. Pemahaman masyarakat untuk melakukan pengembalian dana pun terkendala pemahaman karena dana social bersifat tidak harus dikembalikan. Jenis usaha seperti simpan pinjam ini juga mengalami kendala pada pelaksanaannya karena karakteristik dari masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Hal ini menghambat proses pemberdayaan yang diharapkan oleh BUMDes.

Peningkatan akan pemahaman yang baik bagi pengelola BUMDes menjadi hal yang baik untuk kemajuan desa. Ketika sumberdaya manusia memiliki kapasitas yang baik dalam memahami kondisi desa, maka kreatifitas juga akan terbentuk dan dapat menjalankan peran dalam pemberdayaan.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, M. S., & Abu Talib, N. B. (2015). Empowering local communities: decentralization, empowerment and community driven development. *Quality and Quantity*, 49(2), 827–838. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0025-8>
- Ahmad, M. S., & Talib, N. B. A. (2015). Empirical investigation of community empowerment and sustainable development: quantitatively improving qualitative model. *Quality and Quantity*, 49(2), 637–655. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0014-y>
- Dean, R. J. (2018). Counter-governance: Citizen participation beyond collaboration. *Politics and Governance*, 6(1), 180–188. <https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1221>
- Fennell, S. (2019). The Capability Approach, Empowerment and Participation. *The Capability Approach, Empowerment and Participation*, 125–154. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-35230-9>
- Merdeka.com. (2020). *Dua Desa di NTT Masuk Nominasi 10 Besar BumDes Terbaik Indonesia*.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015
- Rojikinnor, Gani, A. J. A., Saleh, C., & Amin, F. (2022). Organizational Commitment and Expertise in Determining Community Satisfaction Through Good Governance, Quality of Community Services, and Community Empowerment. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00943-w>

- Sari, A. G. P. (2021). The Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management Using Interpretive Structural Modeling: A Case Study at BUMDes Nlagara, Bandung Regency. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(1), 16–35.
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, Moh. S., & Gunawan, G. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Utama, M. S., & Gunartha, I. D. K. A. (2020). Community Empowerment Strategy in Poverty Treatment. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(9), 332–344.